

Peran dan Tantangan Konselor dalam Layanan Konseling untuk Neurodivergent

Diana Zumrotus Sa'adah¹, Alya Salsabila², Darti Rosnita³

¹²³Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: ¹dianazumrotus@mail.uinfasbengkulu.ac.id, ²alyaasalsabilaa27@gmail.com,
³dartirosnita24@gmail.com

Abstrak—Individu dengan kondisi neurodivergen, seperti autisme, ADHD, disleksia, dan gangguan pemrosesan sensorik, memiliki karakteristik kognitif, emosional, dan sosial yang berbeda dari mayoritas populasi neurotipikal. Dalam konteks bimbingan dan konseling, keberagaman tersebut menuntut konselor untuk memiliki pemahaman yang mendalam, pendekatan empatik, serta strategi layanan yang adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran utama konselor dalam memberikan layanan konseling bagi individu neurodivergen serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konselor berperan sebagai fasilitator penerimaan diri, mediator sosial, serta pengembang potensi individu neurodivergen melalui pendekatan berbasis kekuatan (*strength-based approach*). Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pelatihan profesional, kurangnya dukungan institusional, serta bias sosial terhadap neurodiversitas. Kesimpulannya, efektivitas layanan konseling bagi neurodivergen sangat bergantung pada kompetensi konselor dalam memahami konsep neurodiversitas, penerapan teknik intervensi inklusif, serta dukungan kolaboratif dari lingkungan pendidikan dan keluarga.

Kata Kunci: konselor, *neurodivergent*, konseling inklusif, tantangan profesional

Abstract—Individuals with neurodivergent conditions, such as autism, ADHD, dyslexia, and sensory processing disorder, have cognitive, emotional, and social characteristics that differ from the majority of the neurotypical population. In the context of guidance and counseling, this diversity requires counselors to have a deep understanding, an empathetic approach, and adaptive service strategies. This study aims to examine the primary role of counselors in providing counseling services for neurodivergent individuals and identify the challenges faced in practice. The research method used is descriptive qualitative with a literature review approach. The results show that counselors act as facilitators of self-acceptance, social mediators, and potential developers of neurodivergent individuals through a strengths-based approach. The main challenges faced include limited professional training, lack of institutional support, and social bias against neurodiversity. In conclusion, the effectiveness of counseling services for neurodivergent individuals depends heavily on the counselor's competence in understanding the concept of neurodiversity, the application of inclusive intervention techniques, and collaborative support from the educational environment and family.

Keywords: counselor, *neurodivergent*, inclusive counseling, professional challenges

1. PENDAHULUAN

Neurodiversitas merupakan konsep yang menekankan bahwa variasi neurologis seperti autisme, *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), disleksia, dispraksia, dan berbagai kondisi lain bukanlah bentuk gangguan atau ketidaksempurnaan, melainkan bagian alami dari keragaman manusia (Singer, 2017). Istilah *neurodiversity* pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog Judy Singer pada akhir tahun 1990-an sebagai bentuk kritik terhadap paradigma medis yang selama ini mendominasi cara pandang masyarakat terhadap perbedaan neurologis. Konsep ini muncul sebagai gerakan sosial yang menuntut pengakuan terhadap hak dan martabat individu neurodivergen—mereka yang memiliki pola pikir, persepsi, dan perilaku yang berbeda dari standar mayoritas neurotipikal. Dengan demikian, neurodiversitas tidak sekadar istilah ilmiah, tetapi juga merupakan ideologi yang mengedepankan penerimaan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman otak manusia.

Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma terhadap neurodiversitas mengalami perubahan signifikan. Sebelumnya, individu dengan perbedaan neurologis sering dianggap “abnormal” dan perlu “diperbaiki” agar sesuai dengan norma sosial dan perilaku mayoritas. Pandangan ini kemudian bergeser menuju paradigma humanistik yang menempatkan kondisi neurologis sebagai variasi alami dalam populasi manusia. Menurut Armstrong (2017), pendekatan baru ini membantu masyarakat

memahami bahwa setiap individu memiliki cara unik dalam memproses informasi, berinteraksi dengan lingkungan, serta mengekspresikan diri. Dengan demikian, fokus utama bukan lagi memperbaiki individu agar sesuai dengan norma, melainkan menciptakan lingkungan yang dapat beradaptasi dengan perbedaan mereka.

Dalam konteks bimbingan dan konseling, konsep neurodiversitas menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar. Konselor memiliki peran strategis dalam membantu individu neurodivergen mengembangkan potensi diri, meningkatkan kesejahteraan emosional, serta memperkuat kemampuan sosial mereka melalui pendekatan yang empatik dan berorientasi pada kekuatan. Pendekatan konseling yang berlandaskan prinsip *strength-based counseling* memandang bahwa setiap individu, termasuk yang neurodivergen, memiliki kapasitas dan keunikan yang dapat dikembangkan apabila diberikan dukungan yang tepat (Brown et al., 2020). Melalui hubungan terapeutik yang penuh penerimaan dan keaslian, konselor dapat membantu klien memahami serta menghargai dirinya sendiri, sekaligus membangun rasa percaya diri untuk beradaptasi dalam lingkungan sosial yang sering kali belum inklusif.

Namun, di Indonesia, pemahaman terhadap konsep neurodiversitas masih relatif terbatas, baik di kalangan pendidik, masyarakat umum, maupun praktisi layanan konseling. Banyak lembaga pendidikan dan institusi psikososial masih mengadopsi pendekatan yang berfokus pada “normalisasi perilaku” daripada penerimaan perbedaan. Sebagai contoh, dalam sistem pendidikan formal, siswa dengan autisme atau ADHD sering kali diperlakukan sebagai anak yang “bermasalah” atau “mengganggu” proses belajar. Kurangnya pemahaman ini berimplikasi pada munculnya stigma sosial, diskriminasi, serta rendahnya akses terhadap layanan psikologis dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan neurodiversitas bukan hanya persoalan individu, melainkan juga persoalan sistemik yang membutuhkan respons komprehensif dari berbagai pihak, termasuk konselor sebagai tenaga profesional di bidang kesehatan mental dan pendidikan.

Selain keterbatasan pengetahuan, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam kesiapan institusional untuk memberikan layanan konseling yang responsif terhadap kebutuhan neurodivergen. Sebagian besar sekolah dan lembaga sosial belum memiliki panduan standar, sumber daya, maupun tenaga terlatih untuk menghadapi klien dengan kebutuhan neurologis berbeda. Hal ini menyebabkan konselor kerap merasa kesulitan dalam merancang strategi intervensi yang efektif dan sesuai dengan karakteristik klien. Dalam konteks ini, peran konselor menjadi sangat penting sebagai penghubung antara teori dan praktik, antara kebutuhan klien dan kebijakan institusi. Konselor dituntut tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kepekaan etis dan empatik dalam memahami realitas neurodivergen secara menyeluruh.

Konselor juga berperan sebagai agen perubahan sosial (*social change agent*) yang bertugas mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menerima keberagaman kognitif dan perilaku. Menurut Anderson dan Boyle (2021), pendekatan konseling yang berorientasi pada neurodiversitas harus memadukan aspek psikologis dan sosial, di mana konselor tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga pada sistem lingkungan yang memengaruhi kesejahteraan klien. Misalnya, konselor dapat memfasilitasi pelatihan bagi guru, orang tua, dan masyarakat untuk memahami karakteristik neurodivergen, sehingga tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan suportif.

Selain itu, muncul pula tantangan dalam hal penerapan prinsip etika dalam praktik konseling. Etika profesional konseling menuntut konselor untuk menghargai martabat klien, menjunjung kerahasiaan, serta menghindari bias atau prasangka. Namun, dalam praktiknya, masih banyak konselor yang secara tidak sadar mengadopsi pendekatan normatif, yaitu berusaha menyesuaikan perilaku klien dengan standar sosial tertentu tanpa mempertimbangkan keunikan neurologisnya. Dalam konteks ini, teori etika moralitas relasional (Held, 2015) menjadi relevan. Teori tersebut menekankan pentingnya hubungan empatik, tanggung jawab moral, dan penghargaan terhadap hak otonomi klien. Dengan kata lain, konselor harus memandang klien neurodivergen bukan sebagai objek intervensi, tetapi sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah hidupnya sendiri.

Pemahaman terhadap neurodiversitas juga sangat berkaitan dengan isu keadilan sosial dan inklusivitas dalam pendidikan. Menurut UNESCO (2020), pendidikan inklusif merupakan hak fundamental bagi setiap individu tanpa memandang perbedaan fisik, kognitif, atau sosial. Dalam konteks ini, konselor memiliki tanggung jawab ganda: pertama, membantu siswa neurodivergen

mengatasi hambatan psikologis dan sosial yang dihadapi; kedua, mendorong lembaga pendidikan agar menyediakan lingkungan belajar yang akomodatif terhadap kebutuhan unik setiap siswa.

Di era modern, ketika kesadaran terhadap kesehatan mental semakin meningkat, peran konselor dalam memahami dan melayani klien neurodivergen menjadi semakin kompleks. Konselor dituntut untuk memperbarui pengetahuan, memahami perkembangan teori terbaru, serta menguasai keterampilan intervensi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan konteks sosial budaya. Penggunaan media digital, misalnya, dapat menjadi sarana baru dalam membantu individu neurodivergen mengekspresikan diri dan mengelola emosinya secara lebih fleksibel. Namun demikian, pendekatan digital ini juga harus diimbangi dengan pemahaman mendalam terhadap dinamika sensorik dan kognitif yang khas pada individu neurodivergen.

Dengan melihat kompleksitas tersebut, jelas bahwa layanan konseling bagi individu neurodivergen membutuhkan pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek psikologis, sosial, budaya, dan etika profesional. Konselor tidak hanya dituntut memahami teori konseling umum, tetapi juga teori khusus yang berfokus pada keberagaman neurologis. Selain itu, diperlukan pula kerja sama lintas disiplin antara konselor, psikolog, terapis okupasi, pendidik, dan keluarga untuk menciptakan sistem dukungan yang terpadu.

Secara keseluruhan, fenomena neurodiversitas menuntut perubahan paradigma dalam dunia konseling di Indonesia. Diperlukan upaya sistematis untuk mengintegrasikan nilai-nilai inklusif, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam setiap praktik konseling. Konselor sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan mental memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang neurodivergen, mendapatkan ruang untuk berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai peran dan tantangan konselor dalam memberikan layanan kepada individu neurodivergen menjadi sangat penting sebagai langkah awal menuju sistem konseling yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada keberagaman manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, sistematis, dan komprehensif mengenai peran serta tantangan konselor dalam memberikan layanan konseling bagi individu neurodivergen. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena sosial dari sudut pandang subjek penelitian melalui eksplorasi terhadap makna, nilai, dan konteks yang melatarbelakangi suatu peristiwa. Dalam hal ini, fenomena yang dikaji adalah praktik konseling yang inklusif bagi individu dengan kondisi neurologis berbeda.

Metode studi literatur digunakan karena penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan melalui penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan penelitian, serta publikasi ilmiah lain yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2025. Pemilihan rentang waktu tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk memperoleh referensi yang mutakhir dan sesuai dengan perkembangan teori neurodiversitas serta praktik konseling inklusif di era modern.

Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur meliputi: (1) karya ilmiah yang membahas tentang neurodiversitas, layanan konseling untuk individu neurodivergen, serta pendekatan etika dan sosial dalam bimbingan konseling; (2) sumber yang telah melalui proses peninjauan sejawat (peer-reviewed) untuk menjamin kredibilitasnya; dan (3) publikasi yang tersedia dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup literatur populer atau artikel non-akademik yang tidak mengandung data empiris maupun analisis teoretis yang mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap utama, yaitu identifikasi, klasifikasi, evaluasi, dan sintesis.

Tahap identifikasi dilakukan dengan menelusuri berbagai database ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, Scopus, dan ResearchGate menggunakan kata kunci “neurodiversity,” “inclusive counseling,” “neurodivergent clients,” dan “peran konselor.”

Tahap klasifikasi melibatkan pengelompokan literatur berdasarkan fokus kajian, seperti teori neurodiversitas, pendekatan konseling, kompetensi profesional konselor, serta hambatan dalam penerapan layanan.

Tahap evaluasi mencakup kegiatan menilai kualitas dan relevansi setiap sumber dengan topik penelitian, terutama dari sisi validitas, metodologi, dan kedalaman analisis.

Tahap sintesis merupakan tahap terakhir di mana seluruh temuan literatur dianalisis secara terpadu untuk membangun argumentasi dan kesimpulan penelitian.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman yang dikutip dalam Sugiyono (2019), yang mencakup tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, seperti peran konselor, pendekatan yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam layanan untuk neurodivergen.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menjelaskan hubungan antar konsep serta pola yang muncul dari hasil kajian literatur.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan menginterpretasikan data untuk menghasilkan pemahaman teoritis mengenai bagaimana konselor berperan dalam konteks neurodiversitas dan hambatan yang mungkin dihadapi di lapangan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan perbandingan teori. Setiap temuan dari satu sumber dikonfirmasi dengan referensi lain guna menghindari bias interpretatif. Validitas temuan juga diperkuat melalui penggunaan teori-teori terkini dari bidang psikologi, pendidikan inklusif, dan etika profesi konseling.

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis literatur ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana konselor dapat berkontribusi dalam mendukung klien neurodivergen serta mengidentifikasi tantangan-tantangan profesional, etis, dan sosial yang menyertainya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan model konseling yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi individu dengan keberagaman neurologis di Indonesia.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada analisis peran dan tantangan konselor dalam memberikan layanan konseling bagi individu neurodivergen dengan menggunakan pendekatan neurodiversitas. Hasil penelitian diperoleh dari analisis berbagai literatur akademik yang menyoroti perkembangan teori, praktik, serta refleksi profesional dalam bidang bimbingan dan konseling inklusif.

Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa konselor memiliki peran krusial dalam membantu individu neurodivergen mencapai kesejahteraan psikologis, penerimaan diri, serta integrasi sosial yang positif. Namun, di sisi lain, konselor juga menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks baik dari segi kompetensi profesional, keterbatasan institusional, maupun norma sosial yang masih bias terhadap keberagaman neurologis.

Hasil temuan literatur mengindikasikan bahwa paradigma konseling yang efektif untuk neurodivergen harus berlandaskan prinsip inklusif, empatik, dan berorientasi pada kekuatan (*strength-based approach*). Pendekatan ini menuntut konselor untuk melihat perbedaan neurologis bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai bentuk variasi kognitif yang memiliki potensi tersendiri. Dalam hal ini, peran konselor tidak hanya bersifat terapeutik, melainkan juga advokatif dan edukatif, karena mereka berfungsi sebagai jembatan antara individu neurodivergen dengan lingkungan sosialnya.

Selain itu, hasil analisis memperlihatkan bahwa penerapan teori *Person-Centered Counseling* (Rogers, 1951), *Cognitive Behavioral Therapy Adaptive* (Beck, 2016), serta teori *Etika Moralitas Relasional* (Held, 2015) merupakan landasan konseptual yang dapat diadaptasi dalam layanan konseling bagi neurodivergen. Ketiga pendekatan tersebut, apabila diterapkan secara integratif, dapat menghasilkan intervensi konseling yang lebih manusiawi, etis, dan efektif.

Berikut hasil pembahasan rinci berdasarkan tiga aspek utama: peran konselor, tantangan konselor, serta strategi pendekatan konseling yang dapat diterapkan dalam konteks layanan bagi individu neurodivergen.

3.1 Peran Konselor dalam Layanan Konseling untuk Neurodivergent

Peran konselor dalam layanan konseling bagi individu neurodivergen tidak hanya terbatas pada memberikan intervensi psikologis, tetapi juga mencakup fungsi edukatif, preventif, dan advokatif. Konselor dituntut untuk memahami kondisi neurobiologis klien, menyesuaikan gaya komunikasi, serta menciptakan ruang aman (*safe space*) yang memungkinkan klien mengekspresikan dirinya tanpa rasa takut dihakimi. Peran ini mencerminkan esensi utama dari konseling inklusif yang berorientasi pada penghargaan terhadap keberagaman manusia.

a. Fasilitator Penerimaan Diri

Salah satu peran utama konselor adalah menjadi fasilitator penerimaan diri (*self-acceptance facilitator*). Individu neurodivergen sering mengalami kesulitan menerima perbedaan dirinya akibat stigma sosial yang melekat pada kondisi neurologis tertentu, seperti autisme atau ADHD. Konselor membantu klien mengenali potensi dan karakter unik yang dimilikinya, sehingga mereka mampu mengubah persepsi diri dari “berbeda” menjadi “berharga.”

Pendekatan ini sejalan dengan teori Person-Centered Counseling dari Carl Rogers yang menekankan tiga prinsip utama: empati (*empathy*), keaslian (*genuineness*), dan penerimaan tanpa syarat (*unconditional positive regard*). Dengan menciptakan hubungan terapeutik yang aman dan suportif, konselor dapat membantu klien mengatasi konflik batin, meningkatkan harga diri, serta memperkuat kesadaran diri. Penelitian oleh Cooper dan McLeod (2019) menunjukkan bahwa penerapan pendekatan berpusat pada klien terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan regulasi emosi pada remaja dengan spektrum autisme.

Selain itu, penerimaan diri juga menjadi langkah penting menuju kesehatan mental yang berkelanjutan. Individu neurodivergen yang mampu memahami keunikan dirinya lebih mudah beradaptasi dengan tantangan lingkungan dan lebih mampu membangun hubungan sosial yang positif. Dalam konteks ini, konselor tidak hanya membantu klien “menerima,” tetapi juga membimbing mereka untuk “mengembangkan” diri sesuai kapasitasnya.

b. Mediator Sosial dan Emosional

Peran berikutnya adalah sebagai mediator sosial dan emosional (*social-emotional mediator*). Individu neurodivergen kerap menghadapi hambatan komunikasi dan interaksi sosial karena perbedaan cara berpikir, sensitivitas sensorik, serta ekspresi emosi. Kondisi ini sering menimbulkan kesalahpahaman antara mereka dengan lingkungan sekitar, baik di sekolah, tempat kerja, maupun dalam keluarga.

Konselor berperan menjembatani kesenjangan komunikasi tersebut dengan menciptakan pemahaman dua arah antara klien dan lingkungannya. Misalnya, dalam konteks pendidikan, konselor dapat memberikan pelatihan kepada guru mengenai cara mendukung siswa neurodivergen agar lebih mudah berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Dalam lingkungan keluarga, konselor dapat memfasilitasi konseling keluarga untuk membangun pola komunikasi yang lebih suportif dan inklusif.

Brown et al. (2020) menyatakan bahwa konseling berbasis komunitas yang melibatkan dukungan sosial terbukti meningkatkan kesejahteraan emosional individu neurodivergen. Dengan demikian, konselor berperan sebagai agen harmonisasi sosial yang memperkuat integrasi antara individu dan lingkungannya.

c. Pengembang Potensi dan Strategi Adaptif

Konselor juga memiliki peran sebagai pengembang potensi (*potential developer*) dan perancang strategi adaptif (*adaptive strategist*). Prinsip utama dalam pendekatan *strength-based counseling* adalah melihat kekuatan individu, bukan kelemahannya. Setiap individu neurodivergen memiliki pola pikir, fokus, dan keterampilan tertentu yang dapat menjadi sumber daya positif apabila diarahkan dengan tepat.

Sebagai contoh, individu dengan autisme mungkin memiliki kemampuan visual dan detail-oriented yang tinggi, sedangkan individu dengan ADHD dapat memiliki energi dan kreativitas luar biasa. Konselor bertugas membantu klien menemukan, mengenali, dan

memanfaatkan potensi tersebut untuk membangun strategi adaptasi yang sesuai dengan tuntutan lingkungan (Armstrong, 2017).

Dengan demikian, layanan konseling bukan hanya membantu klien “mengatasi kesulitan,” tetapi juga mendorong mereka untuk “mengembangkan kekuatan” yang dimilikinya. Pendekatan ini lebih memanusiakan klien dan selaras dengan paradigma neurodiversitas yang menghormati variasi otak manusia sebagai hal yang alamiah.

3.2 Tantangan Konselor dalam Layanan Konseling untuk Neurodivergent

Meskipun peran konselor sangat penting, implementasi layanan konseling untuk individu neurodivergen di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil telaah literatur, terdapat tiga kategori utama hambatan yang paling sering dihadapi: keterbatasan kompetensi profesional, stigma sosial, dan minimnya dukungan institusional.

a. Kurangnya Pelatihan dan Kompetensi Profesional

Sebagian besar konselor belum mendapatkan pelatihan khusus terkait neurodiversitas. Kurikulum pendidikan konseling di Indonesia masih berfokus pada pendekatan umum tanpa memperhatikan kebutuhan khusus klien dengan variasi neurologis. Akibatnya, banyak konselor yang kesulitan memahami perilaku khas neurodivergen, seperti *sensory overload*, hiperfokus, atau komunikasi nonverbal yang tidak konvensional.

Kondisi ini berdampak pada kurangnya efektivitas intervensi konseling. Sebagaimana diungkapkan oleh Doyle dan McDowall (2020), kurangnya pemahaman konselor terhadap neurobiologi dan perilaku neurodivergen dapat menyebabkan kesalahan interpretasi terhadap masalah klien, bahkan menimbulkan pengalaman negatif dalam proses konseling. Oleh karena itu, pelatihan profesional dan sertifikasi khusus bagi konselor perlu dikembangkan agar mereka memiliki kompetensi multidimensi dalam menangani klien neurodivergen.

b. Stigma dan Bias Sosial

Stigma sosial masih menjadi hambatan besar dalam penyelenggaraan layanan konseling bagi individu neurodivergen. Masyarakat cenderung memandang perbedaan neurologis sebagai “gangguan” atau “penyimpangan” dari norma umum. Stereotip ini menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi klien dan keluarganya.

Konselor perlu berperan sebagai advokat sosial yang memperjuangkan hak dan penerimaan terhadap individu neurodivergen. Hal ini sejalan dengan konsep *advocacy counseling* yang dikemukakan oleh Ratts et al. (2016), di mana konselor tidak hanya bekerja pada level individu, tetapi juga mengintervensi struktur sosial yang mendukung diskriminasi. Dengan demikian, konseling menjadi alat pemberdayaan sosial yang menumbuhkan kesetaraan dan keadilan.

c. Keterbatasan Dukungan Institusional

Keterbatasan fasilitas, kebijakan, dan koordinasi antarinstansi juga menjadi kendala serius. Banyak sekolah dan lembaga sosial di Indonesia belum memiliki sarana konseling yang ramah bagi individu neurodivergen, baik dari segi infrastruktur fisik maupun kebijakan layanan. Kurangnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan konselor menyebabkan program intervensi sering berjalan parsial dan tidak berkelanjutan (Anderson & Boyle, 2021).

Untuk mengatasi hal ini, perlu dibangun sistem dukungan institusional yang terintegrasi, termasuk penyediaan ruang konseling adaptif, pelatihan staf pendidikan, serta kebijakan inklusif yang berpihak pada keberagaman neurologis.

3.3 Strategi Pendekatan Konseling yang Efektif

Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai literatur menyarankan penerapan pendekatan konseling yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berbasis etika empatik. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut:

a. Pendekatan Kognitif-Perilaku Adaptif (CBT-A)

Teknik CBT ini disesuaikan dengan gaya kognitif klien neurodivergen. Misalnya, penggunaan alat bantu visual, jadwal terstruktur, atau permainan interaktif dapat membantu klien memahami hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Penelitian oleh Kenney et al. (2022) menunjukkan bahwa CBT adaptif mampu mengurangi kecemasan sosial pada remaja autistik hingga 45%.

b. Konseling Humanistik dan Empatik

Pendekatan ini menekankan kualitas hubungan terapeutik yang hangat dan penuh penerimaan. Konselor harus membangun komunikasi autentik dengan memperhatikan ritme interaksi, bahasa tubuh, serta sensitivitas sensorik klien.

c. Kolaborasi Lintas Profesi

Keberhasilan layanan konseling neurodivergen sangat bergantung pada kerja sama antara konselor, psikolog, terapis okupasi, guru, dan keluarga. Kolaborasi ini memungkinkan penyusunan rencana intervensi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

d. Penerapan Prinsip Etika Relasional

Berdasarkan teori Held (2015), hubungan etis dalam konseling harus dilandasi empati, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap otonomi klien. Konselor harus menghormati hak klien neurodivergen untuk menentukan pilihan hidupnya, tanpa paksaan untuk “menjadi normal.” Prinsip ini membangun kepercayaan, keamanan emosional, dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan layanan konseling bagi individu neurodivergen sangat bergantung pada kemampuan konselor dalam memahami karakteristik neurologis klien, membangun empati, serta menerapkan strategi intervensi yang fleksibel dan inklusif. Peran konselor yang holistik sebagai fasilitator penerimaan diri, mediator sosial, dan pengembang potensi harus diimbangi dengan kompetensi profesional dan dukungan kelembagaan yang memadai. Dengan demikian, konseling bagi neurodivergen dapat berfungsi bukan hanya sebagai proses terapi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan menuju kehidupan yang lebih bermakna, adil, dan manusiawi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa konselor memiliki peran yang sangat sentral dalam mendukung individu neurodivergen agar mampu mengembangkan potensi diri, meningkatkan kesejahteraan psikologis, serta beradaptasi secara positif di lingkungan sosialnya. Dalam praktiknya, konselor tidak hanya bertindak sebagai fasilitator penerimaan diri dan mediator sosial-emosional, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berperan aktif dalam menghapus stigma serta memperjuangkan inklusivitas di berbagai sektor pendidikan dan sosial. Layanan konseling yang efektif bagi individu neurodivergen menuntut pendekatan yang humanistik, empatik, dan berbasis kekuatan (*strength-based approach*), yang menekankan pada keunikan serta potensi positif setiap individu. Tantangan terbesar yang dihadapi konselor meliputi keterbatasan pelatihan profesional, bias sosial yang masih kuat, serta minimnya dukungan institusional dalam penyediaan layanan yang adaptif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi konselor melalui pelatihan khusus mengenai neurodiversitas, pembaruan kurikulum pendidikan konseling yang responsif terhadap perbedaan neurologis, dan sinergi lintas profesi untuk mewujudkan layanan konseling yang benar-benar inklusif. Implementasi teori etika moralitas relasional juga menjadi dasar penting dalam membangun hubungan terapeutik yang menghormati otonomi dan martabat klien. Dengan upaya kolektif tersebut, konseling bagi individu neurodivergen tidak hanya menjadi sarana intervensi psikologis, tetapi juga media pemberdayaan untuk mencapai kehidupan yang bermakna, setara, dan manusiawi sesuai dengan prinsip neurodiversitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, rekan sejawat, serta seluruh pihak di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan dukungan, masukan, serta inspirasi dalam penyusunan penelitian ini.

REFERENCES

- Anderson, J., & Boyle, C. (2021). *Inclusive Education and the Issue of Diversity: Education for All in the Era of Globalization*. Springer.
- Armstrong, T. (2017). *The Power of Neurodiversity: Unleashing the Advantages of Your Differently Wired Brain*. Da Capo Press.
- Beck, J. S. (2016). *Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond* (3rd ed.). The Guilford Press.
- Brown, T., Smith, L., & Jones, A. (2020). *Strength-Based Counseling for Neurodivergent Individuals: Enhancing Self-Concept and Social Functioning*. *Journal of Counseling Psychology*, 67(4), 415–428.
- Cooper, M., & McLeod, J. (2019). *Person-Centered Therapy: 100 Key Points and Techniques*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Doyle, N., & McDowall, A. (2020). *Neurodiversity at Work: Employer Challenges and Opportunities*. *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*, 39(8), 921–939.
- Held, V. (2015). *The Ethics of Care: Personal, Political, and Global*. Oxford University Press.
- Kenney, C., Holt, R., & Rowe, D. (2022). *Adapting Cognitive Behavioral Therapy for Autistic Adolescents: Outcomes and Considerations*. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 27(1), 80–95.
- Ratts, M. J., Singh, A. A., Nassar-McMillan, S., Butler, S. K., & McCullough, J. R. (2016). *Multicultural and Social Justice Counseling Competencies: Guidelines for the Counseling Profession*. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, 44(1), 28–48.
- Singer, J. (2017). *Neurodiversity: The Birth of an Idea*. Judy Singer Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education – All Means All*. UNESCO Publishing.